

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi sekarang ini, internet merupakan sarana yang paling tepat untuk menyampaikan informasi. Penyampaian informasi ke masyarakat sangat dibutuhkan sebagai pertanggungjawaban dan transparansi pemerintah kepada masyarakat. Keunggulan internet dibandingkan dengan media lain menyebabkan pertumbuhan jumlah pengguna internet terus meningkat tajam. Menurut *Internet WorldStats*, dalam satu dekade terakhir jumlah pengguna internet (*internet users*) di dunia meningkat drastis. Dari 360 juta pengguna pada tahun 2000, pada akhir tahun 2011 jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 2,2 miliar pengguna atau 32, % dari populasi penduduk dunia per 31 Desember 2012 atau tumbuh 528,1 % selama kurun waktu 11 tahun. Sedangkan di Indonesia jumlah pengguna internet per 31 Desember 2011 mencapai 55 juta pengguna internet atau mencapai 22,4% dari populasi penduduk di Indonesia.

Perkembangan yang cepat dalam dunia internet membawa perubahan dalam penyebaran informasi. Banyak perusahaan telah menggunakan internet sebagai alat komunikasi untuk menyediakan informasi mengenai perusahaan, termasuk penyebarluasan informasi keuangan melalui Internet *Financial Reporting (IFR)*. *Internet Financial Reporting (IFR)* adalah sarana untuk melaporkan informasi keuangan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi internet. IFR muncul dan berkembang sebagai media yang

paling cepat untuk menginformasikan hal-hal yang terkait dengan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu isu yang berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan internet dan tingginya angka pengguna internet tersebut adalah transparansi informasi. Menurut Nunuk (2012) hak atas informasi yang transparan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak dapat dipungkiri, internet menjadi salah satu media untuk menerapkan transparansi pengungkapan informasi keuangan. Salah satunya dengan menyediakan laporan keuangan dalam *website* masing-masing Pemerintahan Badan Publik disini berperan penting dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik yang tertulis dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dalam Pasal 7 Undang-undang KIP disebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya, Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

Pertimbangan tersebut antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik. Sebagai media elektronik, Internet sangat mudah dijangkau oleh berbagai kalangan. Oleh karena itu, Badan Publik dapat menyampaikan yang wajib disampaikan kepada publik dengan cara *upload file* ke dalam *website*.

Akan tetapi, setelah 9 (Sembilan) tahun berlalu sejak Undang-undang tersebut ditetapkan, banyak pihak menganggap bahwa penerapan Undang-undang KIP masih mengecewakan. Keterbukaan informasi yang berarti bahwa masyarakat seharusnya dengan mudah dapat mengakses *web* resmi pemerintah, khususnya pemerintah Kota atau Kabupaten, masih tidak berjalan sesuai target yang dicanangkan. Dan jika dikaitkan dengan tingkatan *e-government* seperti yang tercantum dalam intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan kebijakan Pengembangan *e-government*, keterbukaan informasi publik sebenarnya merupakan bentuk perwujudan dari *level/tingkat* pertama yang hanya menuntut ketersediaan informasi yang masih bersifat searah (atau disebut pula *web presence*). Dan tingkat pertama ini menurut *roadmap* implementasi *e-government* seharusnya sudah terpenuhi di tahun 2, akan tetapi kebanyakan pemda masih fokus pada estetika halaman web dan sangat kurang memperhatikan isi dari informasi yang disediakan (Wahid, 2008).

Disamping itu, informasi yang berkaitan dengan keuangan merupakan informasi yang sangat sensitif, yang seharusnya menjadi perhatian utama Pemda

saat menentukan informasi dalam halaman webnya. Salah satunya yaitu informasi keuangan. Tapi pada kenyataannya, masih banyak Pemda yang beranggapan bahwa informasi keuangan adalah informasi rahasia sehingga masyarakat masih kesulitan untuk mengakses data tersebut. Salah satunya adalah penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan menggunakan *website* ini disebut *Internet Financial Reporting*.

Menurut Verawaty (2010), aplikasi internet yang mendukung pengungkapan informasi ini yaitu *e-government*. Istilah *e-government* menurut OECD (2003), didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan terutama internet, sebagai alat untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik. Di Indonesia, inisiatif *e-government* telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika). Dalam instruksi itu dinyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Menyadari akan besarnya manfaat *e-government* tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan tentang penerapan *e-government* dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003.

Penyajian informasi keuangan pemerintah menggunakan *website* ini disebut *Internet Financial Reporting* (IFR). Menurut Oyelere dkk (2003), IFR merupakan kombinasikapasitas dankapabilitas multimedia internetuntuk mengkomunikasikan secara interaktif tentang informasi keuangan. Laporan keuangan yang biasanya dicetak, melalui internet pengguna laporan keuangan dapat didistribusikan lebih cepat (aspek *timeliness*) dan mampu mengeksploitasi kegunaan teknologi ini

untuk lebih membuka diri dengan menginformasikan laporan keuangannya (aspek *disclosure*). Penyampaian informasi keuangan melalui internet (*Internet Financial Reporting* yang disingkat menjadi IFR) merupakan cara yang murah dan efektif (*cost effective*) bagi pemda untuk menyajikan informasi tentang pengelolaan keuangan (Styles dan Tennyson, 2007), namun pemanfaatannya oleh pemerintah daerah belum maksimal. Penelitian Muhammad (2012) menunjukkan bahwa *website* pemda belum digunakan secara optimal dalam mengembangkan pelaporan keuangan. Rata-rata indeks tingkat pengungkapan informasi keuangan pemda terbukti lebih rendah dari pada rata-rata indeks pengungkapan informasi non keuangan (Muhammad, 2012). Selain belum maksimalnya pemanfaatan *website* sebagai media pelaporan keuangan pemerintah, terdapat keberagaman dalam ketersediaan dan keteraksesan komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal tersebut disebabkan belum adanya regulasi yang menjadi standar dalam pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di internet. Adanya keberagaman dalam ketersediaan dan keteraksesan antar pemerintah daerah cukup menarik untuk diteliti. Namun sejauh ini masih sedikit penelitian yang menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesediaan pemerintah untuk mengungkapkan informasi keuangan melalui media internet secara sukarela. Kebanyakan penelitian masih dari perspektif perusahaan privat yang berfokus pada dorongan manajemen dalam memanfaatkan internet sebagai media pengungkapan laporan keuangan. Penelitian dari perspektif sector public yang dilakukan oleh Laswad, et., al (2005) meneliti factor *leverage*, kompetisi politik, kekayaan daerah, visibilitas pers, tipe pemerintahan, dan ukuran otoritas lokal

erhadap pelaporanlaporan keuangan pemerintah di internet secara sukarela.Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *leverage* kekayaan daerah,visibilitas pers,dan tipe pemerintahan memiliki pengaruh yang positif sedangkan kompetisi politik dan ukuran otoritas local memiliki pengaruh yang negatif.

Kekayaan pemerintah adalah pengaruh kekayaan daerah, dana perimbangan dan belanja daerah baik secara bersama-sama maupun secara terpisah terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh. PenelitianStylesdan Tennyson(2007) menganalisis faktor-faktor seperti ukuran daerah, struktur pemerintahan,kualitas pengungkapan akuntansi,pendapatan perkapita,tingkat utang dan kondisi keuangan kota terhadap tingkat ketersediaan dan ke teraksesan laporan keuangan tahunan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota yang lebih besar memiliki kecenderungan melakukan pelaporan keuangan internet.

Ruang lingkup kekayaan daerah di Indonesia secara umum meliputi dua hal, yaitu kekayaan yang dikuasai daerah (domain publik) dan kekayaan yang dimiliki daerah (domain privat). Kekayaan yang dikuasai daerah meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah suatu daerah, sementara kekayaan yang dimiliki daerah terbagi menjadi kekayaan daerah yang tidak dipisahkan pada SKPD dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD atau Perusahaan Daerah.

Untuk mengetahui secara detail kondisi eksisting pengungkapan informasi yang ada di web pemerintahan Kota/Kabupaten dan melakukan penelitian mendalam terkait dengan fakta yang diperoleh, peneliti mengambil judul

“faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Pelaporan Keuangan melalui *E-Government* pada Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka perumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap ketersediaan laporan keuangan melalui *e-government*?
2. Bagaimana Rasio Kemandirian Finansial Pemda berpengaruh terhadap ketersediaan laporan keuangan melalui *e-government*?
3. Bagaimana Opini Audit berpengaruh terhadap ketersediaan laporan keuangan melalui *e-government*?
4. Bagaimana Populasi berpengaruh terhadap ketersediaan laporan keuangan melalui *e-government*?
5. Bagaimana Anggaran berpengaruh terhadap ketersediaan laporan keuangan melalui *e-government*?

1.3 Ruang Lingkup

Penulisan penelitian ini membatasi ruang lingkup permasalahannya hanya pada pengaruh anggaran, Rasio Kemandirian Finansial Pemda, populasi dan opini audit terhadap ketersediaan pelaporan keuangan melalui *e-government* di Pemerintahan Sumsel tahun 2016-2017.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana pengaruh anggaran, RasioKemandirian finansial pemda, populasi, dan opini audit terhadap ketersediaan pelaporan keuangan melalui *e-government* pada Pemerintahan Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sebagai sarana menerapkan ilmu yang telah di pelajari selama masa kuliah.

2. Bagi Akademisi

Sebagai acuan atas refrensi untuk melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan Pengaruh Anggaran, RasioKemandirian Finansial Pemda, Populasi dan Opini Audit terhadap ketersediaan pelaporan keuangan melalu *E-government* pada Pemerintahan SumateraSelatan

3. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pandangan tentang pentingnya ikut serta masyarakat dalam mengontrol informasi keuangan agar pemerintahan dapat berjalan lebih baik.

4. Bagi Pemerintahan

Agar meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dapat dilihat melalui *e-government*.

1.5 Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan ini yaitu untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah serta mempermudah pemahaman tentang masalah-masalah yang disajikan dalam penelitian ini, maka penulisannya akan diuraikan dalam bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah dan fenomena yang akan menjelaskan alasan memilih judul. Bab ini juga memaparkan permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang merupakan dasar analisis yang berkaitan dengan pengaruh anggaran, Rasio kemandirian finansial pemda, populasi dan opini audit terhadap ketersediaan pelaporan keuangan melalui *e-government*, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sampel dan populasi, sumber dan data, analisis data, teknik analisa, objek penelitian, variabel penelitian, instrument penelitian dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum dari objek penelitian, hasil-hasil pengolahan data dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang perlu disampaikan untuk subyek penelitian.